



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

**KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR e-0014 TAHUN 2026

TENTANG

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN NOMOR 137 TAHUN 2021
TENTANG PENETAPAN FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN
TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Menimbang : a. Menindaklanjuti Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor e-0091 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Lampiran Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 137 Tahun 2021 Tentang Penetapan Forum Pembauran Kebangsaan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan Periode Tahun 2021 – 2026, terdapat ada kekurangan keanggotaan dari Suku atau etnis, maka diperlukan pengisian anggota sebagai anggota Forum Pembauran Kebangsaan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan;

b. bahwa...

- b. bahwa Lampiran Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 137 Tahun 2021 Tentang Penetapan Forum Pembauran Kebangsaan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan Periode Tahun 2021-2026 perlu dilakukan penyesuaian mengingat telah dilakukan rapat pleno Pengurus Forum Pembauran Kebangsaan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan pada tanggal 9 Januari 2026 yang hasilnya telah dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 007/FPK-JS/II/2026 tentang Pengganti Antar Waktu Anggota Forum Pembauran Kebangsaan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan Periode Tahun 2021 – 2026, Surat Badan Musyawarah Suku Betawi 1982 Nomor 0002/BAMUS SUKU BETAWI 1982/II/2026 tentang Rekomendasi Anggota FPK Perwakilan Etnis Betawi serta Nota Dinas Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor : e-0005/PU.13.00 tanggal 9 Januari 2026 yang berisikan Laporan Pengganti Antar Waktu Keanggotaan Forum Pembauran Kebangsaan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan periode 2021–2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Tentang Perubahan Keempat Atas Lampiran Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 137 Tahun 2021 Tentang Penetapan Forum Pembauran Kebangsaan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852);
 - 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

3.Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2005) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2007);
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 205, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 2037);
11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2025 Nomor 203);
12. Peraturan Gubernur Nomor 102 Tahun 2011 tentang Satuan Biaya Khusus Untuk Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2011 Nomor 104) telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 102 Tahun 2011 tentang Satuan Biaya Khusus Untuk Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 71004);
13. Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Forum Pembauran Kebangsaan (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013 Nomor 52003);

14. Peraturan...

14. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 71023) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023 Nomor 71005);
15. Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2025 Nomor 62022);
16. Keputusan...
16. Keputusan Gubernur Nomor 568 Tahun 2021 tentang Pengukuhan Anggota Forum Pembauran Kebangsaan Periode Tahun 2021 – 2026 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 332 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Nomor 568 Tahun 2021 tentang Pengukuhan Anggota Forum Pembauran Kebangsaan Periode Tahun 2021 – 2026.
17. Keputusan Gubernur Nomor 357 Tahun 2023 tentang tentang Kuasa Pengguna Anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN NOMOR 137 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN.

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 137 Tahun 2021 Tentang Penetapan Forum Pembauran Kebangsaan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan Periode Tahun 2021-2026 sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Walikota ini.

KEDUA...

- KEDUA : Ketentuan dalam Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 137 Tahun 2021 Tentang Penetapan Forum Pembauran Kebangsaan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan Periode Tahun 2021-2026 tetap berlaku sepanjang tidak diubah dalam Keputusan Walikota ini.
- KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut pada tanggal 2 Februari 2026.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Februari 2026

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN



M ANWAR
NIP. 196605281998031003

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi DKI Jakarta
3. Ka. Polres Metro Jakarta Selatan
4. Dandim 0504/JS
5. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
6. Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan
7. Asisten Pemerintahan Sekko Kota Administrasi Jakarta Selatan
8. Kepala Suku Badan Kesbangpol Kota Administrasi Jakarta Selatan
9. Kepala Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi Jakarta Selatan
10. Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan
11. Kepala Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Selatan
12. Kepala Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Administrasi Jakarta Selatan
13. Kepala Suku Dinas Kebudayaan Kota Administrasi Jakarta Selatan
14. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Selatan
15. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Selatan
16. Kepala Bagian Pemerintahan Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan
17. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan
18. Kepala Bagian Hukum Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan
19. Ketua Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Walikota
Kota Administrasi Jakarta Selatan
Nomor : e-0014 TAHUN 2026
Tanggal : 19 Februari 2026

**SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN (FPK)
TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
PERIODE 2021 - 2026**

NO.	NAMA	UNSUR
1.	Abbas Muni	Etnis Madura
2.	Abdul Rosyid, SH	Etnis Banten
3.	Adih	Etnis Betawi
4.	Drs. Ali Rohmat	Etnis Jawa Tengah
5.	Anita Magdalena Tombeng	Etnis Sulawesi Utara
6.	Ir. Arnella P. Tarigan Sibero, M.Si	Etnis Sumatera Utara (Batak Karo)
7.	Asfi Hidayat	Etnis Betawi
8.	Eddy Supriady, S.Kom, M.M.	Etnis Jawa Barat
9.	Elly Nirmala. S	Etnis Jambi
10.	Dewi Kausaroh , S.E, M.M.	Tokoh Masyarakat Jawa Tengah
11.	Fahmi Assegaf, SH, MH.	Etnis Arab
12.	Fikry Ramadhan	Etnis Betawi
13.	Fransiskus Michael Duwiry	Etnis Papua
14.	I Made Suastika	Etnis Bali
15.	Ibnu Hasan	Etnis Sumatera Selatan
16.	Indrawati Poppy Harahap	Etnis Bangka
17.	Johnny Kranchees, MS	Tokoh Masyarakat Kalimantan Utara
18.	Joni Manan	Etnis Riau
19.	Ka'ab Al Ahbar Pattipawae	Etnis Maluku
20.	Roni Indrawan	Etnis Kalimantan Selatan
21.	La Ode Muchamad Novianto	Etnis Sulawesi Tenggara
22.	M. Dahlan Abdullah	Etnis Lampung
23.	Metha Magdalena Tenggara	Etnis Bengkulu
24.	Minan Effendhi, SH	Etnis Betawi
25.	Monika Oktaviana	Tokoh Masyarakat Kalimantan Barat
26.	Norman Adreson Mbula	Etnis Nusa Tenggara Timur

27.	Octorico Widjaya	Etnis Tionghoa
28.	Riyantiningasih	Etnis DI. Yogyakarta
29.	Rijalulhaq Fatwa, S.Si., M.Si.	Etnis Sulawesi Selatan
30.	Rusdi Djuwaid	Etnis Nusa Tenggara Barat
31.	Robert Wagner Sinambela	Etnis Sumatera Utara (Batak Toba)
32.	Saiful Bahri	Etnis Aceh
33.	Sjahmaula Manaf	Etnis Betawi
34.	Siska fitriah	Etnis Betawi
35.	Siti Agusmaya Made	Etnis Kepulauan Riau
36.	Supratman AS	Etnis Sumatera Barat
37.	Yuniati	Etnis Betawi

WALIKOT5A KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN



M ANWAR

NIP 196605281998031003